

KOSMOLOGI LAUT DAN ETIKA LINGKUNGAN: ANALISIS ANTROPOLOGI EKOLOGI TERHADAP PRAKTIK KEHIDUPAN SUKU BAJO DI DESA MEKAR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE

Mursin¹, Zulzaman², Hardin³

^{1,3}Jurusan Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

²Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

Email: 1mursin@aho.ac.id

ABSTRAK

Kearifan ekologi merupakan bagian integral dari praktik kehidupan masyarakat Suku Bajo yang secara turun-temurun bergantung pada ekosistem laut sebagai ruang hidup utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kearifan ekologi Suku Bajo yang tercermin dalam larangan adat, nilai-nilai filosofis, serta pengetahuan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan alam laut. Larangan adat seperti pantangan melaut pada waktu tertentu, pembatasan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta larangan mengambil biota laut pada musim berkembang biak berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nilai filosofis masyarakat Bajo memandang laut sebagai ruang hidup yang sakral dan memiliki makna spiritual, sehingga harus dihormati dan dijaga keberlanjutannya. Pandangan ini membentuk etika ekologis yang menekankan prinsip keharmonisan antara manusia dan alam serta tanggung jawab antargenerasi. Selain itu, pengetahuan lokal Suku Bajo mengenai musim, arus laut, arah angin, dan perilaku biota laut menjadi dasar dalam menentukan waktu melaut dan pola pemanfaatan sumber daya secara selektif. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kearifan ekologi Suku Bajo berperan sebagai sistem nilai budaya sekaligus strategi adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan laut. Dengan demikian, kearifan ekologi Suku Bajo memiliki kontribusi penting dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kearifan Ekologi, Suku Bajo, Filosofi Adat, Pengetahuan Lokal, Keberlanjutan Lingkungan

ABSTRACT

Ecological wisdom is an integral part of the life practices of the Bajo people, who have traditionally depended on marine ecosystems as their primary living space. This study aims to examine the forms of ecological wisdom of the Bajo, reflected in customary prohibitions, philosophical values, and local knowledge that regulate the relationship between humans and the marine environment. Customary prohibitions such as restrictions on fishing during certain periods, limits on the use of destructive fishing gear, and bans on taking marine life during breeding seasons function as social mechanisms to maintain ecosystem balance. The philosophical values of the Bajo people view the sea as a sacred living space with spiritual significance thus it must be respected and its sustainability preserved. This perspective shapes an ecological ethic that emphasizes the principle of harmony between humans and nature, as well as intergenerational responsibility. In addition, the local knowledge of the Bajo people regarding seasons, ocean currents, wind directions, and the behavior of marine organisms serves as a basis for determining fishing times and patterns of selective resource use. These practices demonstrate that the ecological wisdom of the Bajo people functions both as a system

of cultural values and as an adaptive strategy for dealing with the dynamics of the marine environment. Thus, the ecological wisdom of the Bajo people plays an important role in supporting the sustainable conservation of coastal and marine environments.

Keywords: Ecological Wisdom, Bajo People, Customary Philosophy, Local Knowledge, Environmental Sustainability

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan pesisir dan laut yang semakin meningkat merupakan salah satu tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Eksplorasi sumber daya laut yang tidak terkendali, penggunaan alat tangkap destruktif, pencemaran, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang kurang mempertimbangkan aspek sosial-budaya telah berdampak pada degradasi ekosistem laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, pendekatan pengelolaan lingkungan yang hanya bertumpu pada regulasi formal negara sering kali belum mampu menjawab kompleksitas persoalan ekologis, terutama di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan terhadap kearifan ekologi lokal menjadi sangat penting sebagai alternatif sekaligus pelengkap dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Salah satu komunitas adat yang memiliki sistem kearifan ekologi yang kuat adalah Suku Bajo. secara leksikal Bajo dalam bahasa Lamaholot artinya mendayung perahu sebagai masyarakat bahari yang hidup dan bergantung sepenuhnya pada laut, Suku Bajo membangun hubungan yang sangat erat dengan lingkungan laut, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang sarat dengan makna sosial, budaya, dan spiritual. Hubungan tersebut melahirkan seperangkat nilai, norma, dan pengetahuan lokal yang mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut secara arif dan berkelanjutan (Haerulloh et al., 2021). . Kearifan ekologi Suku Bajo tercermin secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari melalui larangan adat, nilai filosofi hidup, serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Kearifan lokal Suku Bajo di seperti di Torosiaje, Sampela, dan Soropia menunjukkan kesamaan mendasar dalam memandang laut sebagai ruang hidup yang sakral sekaligus sumber utama penghidupan. Laut tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek eksplorasi ekonomi, melainkan sebagai entitas yang harus dijaga keseimbangannya melalui pengetahuan lokal tentang musim, angin, arus, dan ombak. Pengetahuan etnoekologi ini diwariskan secara lisan dan menjadi pedoman dalam menentukan waktu melaut, jenis alat tangkap, serta wilayah yang boleh dan tidak boleh dieksplorasi.

Secara komparatif, Suku Bajo di Torosiaje relatif lebih konsisten mempertahankan praktik pemanfaatan sumber daya laut secara selektif melalui mekanisme adat dan musyawarah komunitas. Di Sampela, kearifan ekologi tetap hidup tetapi menghadapi tekanan sosial-ekonomi dan ekologis yang lebih besar, sehingga mitos, pantangan, dan kepercayaan kosmologis berperan penting sebagai alat kontrol sosial. Sementara itu, Suku Bajo di Soropia menampilkan kearifan ekologi yang kuat dalam bentuk larangan adat melaut pada waktu tertentu, pemilihan alat tangkap ramah lingkungan, serta pola permukiman rumah panggung di pesisir yang adaptif terhadap dinamika laut. Secara keseluruhan, ketiga komunitas ini menunjukkan bahwa kearifan ekologi Suku Bajo bersifat dinamis, kontekstual, dan berfungsi menjaga keberlanjutan hubungan antara manusia, laut, dan lingkungan pesisir.

Larangan adat dalam masyarakat Suku Bajo berfungsi sebagai mekanisme sosial sekaligus ekologis untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya laut. Berbagai pantangan seperti larangan menangkap ikan pada waktu tertentu, larangan merusak terumbu karang, larangan mengambil hasil laut secara berlebihan, serta larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan merupakan bentuk regulasi adat yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Larangan-larangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung makna moral dan spiritual. Pelanggaran terhadap larangan adat diyakini dapat menimbulkan sanksi sosial maupun konsekuensi yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan leluhur, sehingga mendorong kepatuhan kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Selain larangan adat, kearifan ekologi Suku Bajo juga berakar kuat pada nilai filosofi yang memandang manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Laut diposisikan sebagai entitas yang memberi kehidupan dan harus dihormati, bukan dieksplorasi secara serakah. Nilai filosofi ini menanamkan prinsip keseimbangan, keharmonisan, dan tanggung jawab antargenerasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Cara pandang tersebut membentuk etika lingkungan yang menuntun masyarakat Suku Bajo untuk hidup selaras dengan alam laut dan menghindari tindakan yang dapat merusak keberlanjutan ekosistem.

Kearifan ekologi tersebut diperkuat oleh pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat Suku Bajo, seperti pemahaman tentang musim angin, arus laut, pasang surut, perilaku ikan, serta tanda-tanda alam lainnya. Pengetahuan lokal ini menjadi dasar dalam menentukan waktu melaut, lokasi penangkapan ikan, serta strategi pemanfaatan sumber daya laut yang aman dan berkelanjutan. Keberadaan seseorang dalam lingkungan mengharuskan penyesuaian diri terus menerus untuk dapat menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Di sisi lain, identitas asal yang telah menjadi bagian dari sejarah dan diri serta kehidupan seseorang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan kecenderungan kebudayaan bawaan atau kearifan lokal sering menjadi panduan dalam kehidupan di tempat yang baru sekalipun. Sementara proses dinamis dapat terjadi pada saat berlangsungnya interaksi yang terus menerus dengan para pihak dan dunia luar (Wantu et al., 2022). Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman empiris yang panjang dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi modal sosial dan ekologis yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat Bajo. Namun, dalam perkembangan sosial dan ekonomi saat ini, praktik kearifan ekologi Suku Bajo menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi teknologi penangkapan ikan, penetrasi ekonomi pasar, perubahan pola hidup generasi muda, serta kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang kurang mengakomodasi sistem adat berpotensi mengikis keberadaan larangan adat, nilai filosofi, dan pengetahuan lokal yang selama ini berfungsi menjaga keseimbangan ekologi laut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana bentuk kearifan ekologi Suku Bajo saat ini, bagaimana peran larangan adat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut, nilai-nilai filosofi apa yang melandasi hubungan masyarakat dengan laut, serta sejauh mana pengetahuan lokal tersebut masih dipraktikkan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal Suku Bajo seperti di Torosiaje, Sampela, dan Soropia menunjukkan kesamaan mendasar dalam memandang laut sebagai ruang hidup yang sakral sekaligus sumber utama penghidupan. Laut tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai entitas yang harus dijaga keseimbangannya melalui pengetahuan lokal tentang musim, angin, arus, dan ombak. Pengetahuan etnoekologi ini diwariskan secara lisan dan menjadi pedoman dalam menentukan waktu melaut, jenis alat tangkap, serta wilayah yang boleh dan tidak boleh dieksplorasi.

Secara komparatif, Suku Bajo di Torosiaje relatif lebih konsisten mempertahankan praktik pemanfaatan sumber daya laut secara selektif melalui mekanisme adat dan musyawarah komunitas. Di Sampela, kearifan ekologi tetap hidup tetapi menghadapi tekanan sosial-ekonomi dan ekologis yang lebih besar, sehingga mitos, pantangan, dan kepercayaan kosmologis berperan penting sebagai alat kontrol sosial. Sementara itu, Suku Bajo di Soropia menampilkan kearifan ekologi yang kuat dalam bentuk larangan adat melaut pada waktu tertentu, pemilihan alat tangkap ramah lingkungan, serta pola permukiman rumah panggung di pesisir yang adaptif terhadap dinamika laut. Secara keseluruhan, ketiga komunitas ini menunjukkan bahwa kearifan ekologi Suku Bajo bersifat dinamis, kontekstual, dan berfungsi menjaga keberlanjutan hubungan antara manusia, laut, dan lingkungan pesisir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kearifan ekologi dalam praktik kehidupan Suku Bajo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk kearifan ekologi yang tercermin dalam larangan adat, nilai filosofi, dan pengetahuan lokal, serta menganalisis perannya dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat Suku Bajo dalam mempertahankan kearifan ekologi di tengah arus perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekologi budaya, antropologi lingkungan, dan studi masyarakat pesisir dengan menghadirkan pemahaman empiris tentang praktik kearifan ekologi masyarakat bahari. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta berbasis kearifan lokal. Sementara itu, secara sosial dan kultural, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya Suku Bajo, khususnya dalam mentransmisikan nilai-nilai ekologis kepada generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi bagi keberlanjutan lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali dan memahami lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk kearifan ekologi dalam kehidupan suku Bajo yang ada di Desa Mekar Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dalam memahami Kosmologi laut dan etika lingkungan Suku Bajo. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengungkap realitas sosial budaya terkait kearifan ekologi suku Bajo. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus utama pada etika lingkungan dan kosmologi laut pada suku Bajo.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasari pada pertimbangan bahwa desa ini adalah terdapat suku Bajo yang masih melakukan praktik perlindungan lingkungan berbasis kearifan lokal.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan pada tanggal 01 Oktober 2025 yang sekaligus merupakan batas akhir pengumpulan data primer melalui observasi partisipatif dan wawancara. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Bapak SY (59 tahun), Bapak AF (63 tahun). Bapak NJ (57 tahun) sebagai tokoh adat Bajo, RZ (42 tahun) Tokoh pemuda bajo/ Pemerhati Suku Bajo, dan AY (48 tahun) tokoh perempuan suku Bajo. Aktifitas pengumpulan data secara intensif dan rentang waktu sebelum tanggal tersebut. Yang mencakup observasi kegiatan suku bajo, praktik ekologis. Dengan demikian 01 Oktober menandai selesainya waktu penelitian.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *Purposive Sampling* yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam tentang kearifan ekologi (Sugiono, 2013). Informan terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, warga masyarakat Bajo,

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas masyarakat secara langsung, sedangkan wawancara mendalam membantu menggali nilai-nilai budaya dan praktik kearifan ekologi suku Bajo . Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen lapangan, arsip desa, serta catatan kegiatan kebudayaan suku Bajo yang relevan (Daniel dan Harland 2017). Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Triangulasi ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik saling menguatkan dan memberikan gambaran utuh terhadap fenomena yang dikaji. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling berkesinambungan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan transkrip wawancara dengan memfokuskan pada pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkodean dan pengelompokan data ke dalam tema-tema tertentu. Kedua, penyajian data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan data. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan makna data dan menarik kesimpulan sementara yang terus diuji melalui pengecekan ulang data, perbandingan antar-informan, dan triangulasi. Proses ini memastikan kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Almubarak dan Rahmat 2021)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan pengembangan budaya sangat mempengaruhi jati diri bangsa, kesatuan masyarakat berperan serta dalam pembentukannya. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pembentukan budaya agar terus bertahan diperkembangan jaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kemampuannya, sehingga manusia mampu menguasai

alam (Fadhliah H Dai & Ramoend Manahung, 2020). Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat Bahari yang hidup sangat dekat dengan laut. Ketergantungan mereka terhadap laut dan atau sumberdaya pesisir membentuk sistem pengetahuan lokal yang berfungsi menjaga kearifan ekologi laut secara turun temurun.

Pantangan Suku Bajo Dalam Melaut

Suku Bajo memiliki norma adat yang melarang penggunaan alat tangkap destruktif, seperti bom ikan dan racun. Praktik ini diyakini dapat merusak terumbu karang dan mengancam keberlanjutan sumberdaya laut. Pelanggaran terhadap larangan ini biasanya dikenai sangsi adat dan tekanan sosial. Suku Bajo dalam budaya melaut dipengaruhi oleh warisan budaya yang bersifat kental karena diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Suku Bajo di Desa Mekar Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe banyak menganut pantangan dalam melaut seperti Menurut salah satu Tokoh Masyarakat nelayan menyebutkan tentang larangan membuang cabai dan jeruk. Beliau menyatakan bahwa: "Didalam usaha penangkapan ikan, Masyarakat mengenal beberapa larangan antara lain adalah dilarang membuang cabai, jeruk, kopi, sagu dan minyak di laut. Menurutnya cabai dan jeruk merupakan bahan alami yang bersifat pedas dan dapat memberikan rasa sakit, sedangkan kopi, sagu dan minyak merupakan makanan yang tidak disuka. Jika melanggar salah satu larangan tersebut hal ini akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena akan terjadi musibah, seperti angin kencang, badai, gelombang besar dan arus yang besar, Selain mengenal beberapa larangan dalam melakukan penangkapan ikan seperti dilarang membuang benda-benda tersebut Masyarakat Otipulu juga mengenal berbagai tempat yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan seperti Pulau Keramat. Pulau Keramat adalah pulau yang dikeramatkan oleh Masyarakat Otipulu, sehingga banyak nelayan yang tidak pernah atau bahkan langgar didekat pulau tersebut dalam melakukan penangkapan ikan. Dilarangnya nelayan melakukan penangkapan ikan di daerah Pulau Keramat sebab diyakini pulau tersebut merupakan tempat tinggal salah satu penghuni laut atau masyarakat mengenal dengan nama Sangia Ndahi. Sangia Ndahi merupakan penamaan lokal yang sering diucapkan oleh Masyarakat yang berarti gurita raksasa. Sangia Ndahi atau gurita raksasa ini sering menenggelamkan kapal nelayan yang melakukan penangkapan ikan. Selain itu pula akan membunuh masyarakat yang melakukan penangkapan ikan disekitar daerah pulau tersebut. (Jayanti et al., 2018).

Kebudayaan dipahami sebagai sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling terkait dan berfungsi menjaga keteraturan serta keseimbangan sosial. Mitos Sangia Ndahi—yang digambarkan sebagai gurita raksasa penjaga wilayah tertentu—berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur perilaku nelayan Bajo agar tidak mengeksplorasi wilayah Pulau Keramat secara berlebihan. Mitos ini bekerja sebagai alat kontrol sosial informal dengan membangun rasa takut sekaligus penghormatan terhadap wilayah yang dianggap sakral. Kepercayaan bahwa Sangia Ndahi akan mendatangkan bahaya bagi siapa pun yang melanggar larangan melaut atau menangkap ikan di Pulau Keramat mendorong kepatuhan tanpa memerlukan sanksi formal. Dalam kerangka struktural fungsional, mitos tersebut berfungsi menjaga stabilitas sistem sosial dengan menginternalisasi norma konservasi sumber daya laut ke dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu, mitos Sangia Ndahi berperan mempertahankan keseimbangan ekologis dan sosial. Larangan eksploitasi wilayah keramat secara tidak langsung menciptakan zona perlindungan alami bagi ekosistem laut, yang pada akhirnya menjamin keberlanjutan sumber penghidupan nelayan. Dengan demikian, mitos tidak sekadar menjadi cerita simbolik, tetapi berfungsi nyata dalam menjaga kelangsungan sistem ekonomi, kepercayaan, dan solidaritas sosial masyarakat Bajo. Melalui kacamata struktural fungsional, mitos Sangia Ndahi dapat dipahami sebagai bagian integral dari struktur budaya yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan alam, sekaligus memastikan keteraturan sosial dan keberlanjutan kehidupan komunitas nelayan Bajo. Mitos Sangia Ndahi banyak mengajarkan suku Bajo tentang bagaimana menjaga areal konservasi laut, hal ini menjadi alat kontrol sosial yang menanamkan rasa takut sekaligus hormat terhadap laut, hal ini menunjukkan bahwa kpercayaan tradisional bukan sekadar cerita simbolik, melainkan sistem pengetahuan suku Bajo yang memiliki fungsi ekologi sehingga dapat membangun etika lingkungan yang selaras dengan prinsip konservasi dan membuktikan bahwa keberlanjutan alam dapat dijaga melalui mekanisme budaya dan kosmologi yang hidup dalam keseharian Masyarakat Bajo.

Kebudayaan ini tetap bertahan hingga saat ini. Adanya semacam adat istiadat, bahasa, tutur kata, simbol yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi inti dari kebudayaan suku Bajo yang secara dominan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka itulah disebut identitas. Maksudnya, budaya dari nenek moyang yang kuat dan dominan dihidupi oleh suatu lingkungan kehidupan masyarakat Bajo (Wa Ode Siti Nurhaliza, n.d.)

Pemanfaatan Sumberdaya laut secara selektif

Nelayan Bajo hanya mengambil ikan dan biota laut dalam ukuran tertentu dan jumlah yg secukupnya. Ikan kecil atau yang sedang bertelur biasanya dilepaskan kembali. Prinsip ini mencerminkan kesadaran ekologis untuk menjaga regenerasi alam. Masyarakat Bajo merupakan komunitas maritim yang memiliki hubungan erat dengan laut sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, dan simbol identitas budaya. Dalam memanfaatkan sumber daya laut, masyarakat Bajo menerapkan pola pemanfaatan yang bersifat selektif dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem laut. Pola ini terbentuk dari akumulasi pengetahuan lokal, nilai filosofis, serta norma adat yang diwariskan secara turun-temurun (Suyuti, 2011; Berkes, 2012). Pemanfaatan sumber daya laut secara selektif terlihat dari pemilihan alat tangkap tradisional yang digunakan oleh masyarakat Bajo. Alat tangkap seperti pancing, tombak, panah ikan, dan jaring tradisional memungkinkan nelayan memilih secara langsung jenis dan ukuran biota laut yang akan diambil. Praktik ini secara ekologis lebih ramah lingkungan karena meminimalkan tangkapan sampingan (bycatch) dan kerusakan habitat laut, terutama terumbu karang (Bailey & Zerner, 1992). Penggunaan alat tangkap destruktif seperti bom ikan dan racun ikan secara adat dianggap melanggar norma dan berpotensi menimbulkan sanksi sosial maupun adat (Satria, 2015).

Selain alat tangkap, selektivitas juga tampak pada pemilihan jenis dan ukuran biota laut yang ditangkap. Masyarakat Bajo umumnya menghindari penangkapan ikan berukuran kecil atau biota yang sedang berkembang biak. Pengetahuan mengenai siklus hidup ikan, teripang, dan moluska diperoleh melalui pengalaman melaut serta pengamatan langsung terhadap kondisi perairan (Gusman & Widodo, 2019). Dengan demikian, praktik ini berfungsi

sebagai mekanisme pengendalian eksplorasi sumber daya laut secara alami. Aspek selektif lainnya tercermin dalam pengaturan waktu dan musim penangkapan. Nelayan Bajo memahami bahwa laut memiliki fase-fase tertentu yang memengaruhi ketersediaan sumber daya. Penangkapan biasanya disesuaikan dengan musim angin, arus laut, dan tanda-tanda alam lainnya. Pada musim tertentu, beberapa jenis biota laut sengaja tidak dieksplorasi untuk memberi kesempatan regenerasi populasi (Berkes, 2012). Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang kuat dalam sistem pengetahuan lokal masyarakat Bajo.

Pemanfaatan sumber daya laut secara selektif juga diperkuat oleh larangan adat terhadap wilayah laut tertentu. Beberapa kawasan terumbu karang atau perairan tertentu dianggap sakral dan tidak boleh dieksplorasi secara bebas. Larangan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural penjaga laut, namun secara ekologis berfungsi sebagai bentuk konservasi tradisional yang melindungi habitat penting dan menjaga keseimbangan ekosistem laut (Adhuri, 2013). Lebih jauh, praktik selektif masyarakat Bajo tidak dapat dilepaskan dari nilai filosofis hidup yang menekankan harmoni antara manusia dan laut. Laut dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keberlangsungannya. Prinsip mengambil hasil laut secukupnya sesuai kebutuhan menjadi landasan etika ekologis masyarakat Bajo, sehingga eksplorasi berlebihan dianggap bertentangan dengan nilai budaya mereka (Suyuti, 2011; Satria, 2015). Namun demikian, praktik pemanfaatan sumber daya laut secara selektif menghadapi tantangan akibat modernisasi, tekanan ekonomi, serta masuknya teknologi penangkapan modern yang kurang ramah lingkungan. Perubahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir juga berpotensi menggeser peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut (Adhuri, 2013). Oleh karena itu, integrasi antara pengetahuan lokal masyarakat Bajo dan kebijakan pengelolaan laut modern menjadi penting untuk mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

Pola Pemukiman ramah lingkungan

Julian Steward melalui teori ekologi budaya menekankan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan alam bersifat dinamis dan saling membentuk. Dalam pandangannya, lingkungan tidak menentukan kebudayaan secara mutlak, tetapi menjadi faktor penting yang memengaruhi pola adaptasi, terutama pada aspek teknologi subsistensi, organisasi kerja, dan struktur sosial. Kerangka ini relevan untuk memahami masyarakat Bajo yang hidup dan bergantung langsung pada lingkungan laut. Bagi masyarakat Bajo, laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi menjadi inti kebudayaan yang membentuk cara hidup, sistem nilai, dan struktur sosial mereka. Lingkungan laut yang terbuka, dinamis, dan berisiko tinggi menuntut kemampuan adaptasi khusus. Dalam konteks ekologi budaya, laut berfungsi sebagai lingkungan ekologis utama yang mendorong terbentuknya sistem subsistensi berbasis penangkapan ikan, menyelam, dan pelayaran tradisional. Aktivitas ini memerlukan keterampilan khusus yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga membentuk pola pembagian kerja berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pengalaman melaut.

Struktur sosial masyarakat Bajo juga mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan laut. Hubungan sosial bersifat relatif egaliter karena keberhasilan melaut sangat bergantung pada kerja sama dan solidaritas kelompok. Prinsip

saling berbagi hasil tangkapan dan tolong-menolong di laut merupakan strategi sosial untuk mengurangi risiko ekologis, sebagaimana dikemukakan Steward bahwa organisasi sosial berkembang sebagai respons terhadap tuntutan lingkungan. Kepemimpinan dalam komunitas Bajo umumnya bersifat fungsional, di mana tokoh yang dihormati adalah mereka yang memiliki pengetahuan luas tentang laut, musim, arus, dan keselamatan pelayaran.

Selain itu, pola permukiman masyarakat Bajo—seperti rumah panggung di atas laut atau di pesisir—dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi ekologis. Permukiman ini memudahkan akses ke sumber daya laut sekaligus mencerminkan keterikatan sosial yang kuat antaranggota komunitas. Dalam perspektif ekologi budaya, pola permukiman tersebut merupakan bagian dari cultural core, yakni unsur kebudayaan yang paling langsung berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan.

Nilai-nilai budaya seperti pantangan melaut pada kondisi tertentu, penghormatan terhadap laut, serta kepercayaan terhadap makhluk penjaga laut juga berfungsi sebagai mekanisme ekologis. Nilai ini membantu mengatur eksploitasi sumber daya agar tetap berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Julian Steward bahwa sistem kepercayaan dan struktur sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks adaptasi ekologis masyarakat. Dengan demikian, melalui pendekatan ekologi budaya Julian Steward, dapat dipahami bahwa lingkungan laut berperan penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat Bajo. Laut tidak hanya menyediakan sumber penghidupan, tetapi juga menjadi faktor utama yang memengaruhi organisasi sosial, pola permukiman, sistem nilai, dan solidaritas komunitas. Struktur sosial masyarakat Bajo pada akhirnya merupakan hasil dari proses adaptasi panjang terhadap kondisi ekologis laut yang khas dan menantang.

Permukiman suku Bajo dibangun di atas laut dengan struktur rumah panggung. Model ini meminimalkan pembukaan lahan darat dan memungkinkan adaptasi terhadap pasang surut air laut tanpa merusak ekosistem pesisir secara besar-besaran. Kondisi ekologi pesisir Desa Mekar harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan permukiman masyarakat Bajo saat sekarang dan pada masa yang akan datang. Pertimbangan ini terkait dengan kenyataan bahwa kehidupan masyarakat Bajo sangat tergantung pada aktivitas perikanan laut yang produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem terumbu karang. (Aris Prihandono, 2012).

Pola pemukiman Suku Bajo di Desa Mekar Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, menunjukkan bentuk adaptasi ekologis yang erat dengan lingkungan pesisir. Rumah-rumah dibangun berbentuk panggung di atas perairan dangkal dengan menggunakan tiang kayu, sehingga tidak memerlukan reklamasi atau pengurukan pantai. Pola ini memungkinkan masyarakat Bajo tetap tinggal dekat dengan sumber mata pencaharian utama mereka, yaitu laut, tanpa merusak ekosistem pesisir secara signifikan (Kusnadi, 2009). Secara ekologis, pemukiman Bajo di Desa Mekar tersusun mengikuti garis pantai dan perairan tenang, serta terhubung oleh jembatan kayu sederhana. Tata ruang ini bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perubahan pasang surut laut. Penggunaan bahan bangunan lokal dan teknik konstruksi tradisional mencerminkan prinsip keberlanjutan, karena minim konsumsi sumber daya eksternal dan mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Menurut penelitian oleh Rahim dkk. (2018), pola pemukiman ini mencerminkan kearifan lokal

masyarakat Bajo dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan hunian dan kelestarian lingkungan pesisir. Dengan demikian, pola pemukiman Suku Bajo di Soropia tidak hanya berfungsi sebagai ruang tinggal, tetapi juga sebagai bentuk pengetahuan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Pola ini menjadi bukti bahwa praktik permukiman tradisional dapat mendukung kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Nilai Filosofis “Laut sebagai Ibu kehidupan”

Bagi suku Bajo, laut dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati, bukan di eksploitasi. Nilai ini ditanamkan sejak kecil melalui cerita lisan, mitos, dan praktik sehari-hari. sehingga membentuk etika lingkungan yang kuat. Dalam pandangan hidup Suku Bajo, laut dimaknai sebagai ibu yang memberi kehidupan, perlindungan, dan keberlanjutan bagi manusia. Filosofi ini tumbuh dari sejarah panjang kehidupan orang Bajo yang secara turun-temurun menggantungkan seluruh aspek hidupnya pada laut, mulai dari pangan, tempat tinggal, hingga identitas budaya. Laut diperlakukan bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai entitas yang harus dihormati dan dijaga sebagaimana seorang anak menjaga ibunya (Sopher, 1977).

Bagi Suku Bajo, laut bukan sekadar ruang geografis atau sumber ekonomi, melainkan inti dari kehidupan dan identitas budaya. Laut dipahami sebagai ruang hidup yang menyatukan aspek kosmologis, sosial, dan ekologis. Dalam pandangan filosofis orang Bajo, manusia adalah bagian dari laut, bukan penguasa atasnya. Karena itu, hubungan dengan laut dibangun atas dasar penghormatan, keseimbangan, dan etika.

Laut diyakini memiliki dimensi spiritual yang dijaga oleh kekuatan gaib atau penjaga laut. Keyakinan ini melahirkan sikap hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya laut serta melandasi berbagai pantangan dan aturan adat, seperti larangan melaut pada musim tertentu atau mengeksploitasi wilayah yang dianggap keramat. Filosofi ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku agar tidak merusak ekosistem laut.

Secara sosial, laut menjadi ruang pembentuk solidaritas dan pengetahuan kolektif. Pengetahuan tentang angin, arus, ombak, dan musim diwariskan secara lisan antargenerasi sebagai bagian dari kearifan ekologi. Dengan demikian, filosofi laut bagi Suku Bajo menegaskan bahwa keberlanjutan hidup manusia hanya dapat dicapai melalui relasi harmonis dengan laut sebagai sumber kehidupan dan ruang sakral. Pemaknaan laut sebagai ibu membentuk nilai moral dan etika ekologis masyarakat Bajo dalam memanfaatkan sumber daya laut. Praktik penangkapan ikan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, menghindari perusakan terumbu karang, serta tidak mengambil hasil laut secara berlebihan. Keyakinan bahwa laut dapat “memberi rezeki” sekaligus “memberi peringatan” jika diperlakukan tidak adil menjadi dasar pengendalian diri dalam aktivitas melaut. Menurut Stacey (2007), nilai-nilai ini berfungsi sebagai sistem pengelolaan sumber daya berbasis budaya yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, filosofi laut sebagai ibu berperan penting dalam pewarisan pengetahuan lokal dan identitas sosial Suku Bajo. Melalui cerita lisan, petuah orang tua, dan praktik keseharian di laut, nilai penghormatan terhadap laut ditanamkan sejak dulu kepada generasi muda. Dengan demikian, filosofi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi landasan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Bajo.

Dalam pandangan antropologis, pemaknaan laut sebagai ibu kehidupan oleh Suku Bajo mencerminkan relasi budaya yang intim antara manusia dan alam. Laut dipahami sebagai entitas hidup yang memberi kehidupan, perlindungan, dan keberlanjutan, sehingga harus dihormati dan dijaga. Metafora ibu menempatkan manusia bukan sebagai penguasa laut, melainkan sebagai bagian darinya. Pemahaman ini membentuk etika ekologis masyarakat Bajo melalui pantangan, mitos, dan aturan adat yang mengendalikan eksplorasi sumber daya laut. Secara fungsional, kepercayaan tersebut menjaga keseimbangan sosial dan ekologis, sementara secara ekologis-budaya menunjukkan adaptasi kultural terhadap lingkungan maritim. Dengan demikian, laut sebagai ibu kehidupan menjadi dasar moral dan kultural bagi praktik konservasi alam Suku Bajo

Pengetahuan Lokal tentang musim dan arus laut

Sistem pengetahuan merupakan salah satu unsur kebudayaan universal, yang ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan di dunia, baik dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks (Koentjaraningrat, 1992: 2). Pengetahuan lokal suku Bajo dalam aktivitas kehidupannya sebagai nelayan dan kegiatan pelayaran. Suku Bajo memahami dan menerapkan pengetahuan lokal yang berkaitan dengan keadaan cuaca, letak bintang, dan tanda-tanda alam lainnya dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan dan pelayaran. Pengetahuan lokal itu diperoleh secara turun temurun dan masih menjadi pedoman masyarakat suku Bajo sampai sekarang. Suku Bajo memiliki sistem pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kondisi alam laut, yaitu pengetahuan tentang wilayah tangkapan, jenis-jenis biota laut, dan pengetahuan navigasi dalam pelayaran. Pengetahuan (knowledge) merupakan sesuatu yang pasti ada dalam setiap masyarakat, sesuai dengan jenis mata pencaharian yang mereka miliki dan lingkungan tempat mereka berada. Menurut Koetjaraningrat (2009: 288), masyarakat sekecil apapun tidak dapat hidup tanpa memiliki pengetahuan tentang alam sekelilingnya. Setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuan relatif banyak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya, sistem pengetahuan tentang astronomi, pengetahuan tentang ekonomi dan mata pencaharian, pengetahuan tentang lingkungan alam, dan pengetahuan tentang berbagai ritual dan sebagainya. Bagi orang Bajo laut merupakan bagian integral, mereka lahir, hidup dan mati di atas air laut. Suku Bajo memiliki pengetahuan mengenai perubahan musim, arah angin, dan arus laut. Pengetahuan ini digunakan untuk menentukan waktu melat yang tepat sehingga tidak memaksakan eksplorasi saat kondisi laut tidak mendukung atau masa reproduksi ikan. Masyarakat Suku Bajo memiliki sistem pengetahuan lokal yang kuat dalam memahami ombak sebagai bagian penting dari keselamatan dan keberhasilan aktivitas melaut. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman langsung, pengamatan alam secara terus-menerus, serta pewarisan pengetahuan dari orang tua dan tetua adat. Ombak tidak dipahami semata-mata sebagai gejala alam, melainkan sebagai tanda atau isyarat yang menunjukkan kondisi laut.

Etnoekologi merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana suatu masyarakat memahami, mengklasifikasikan, dan memaknai lingkungan alam berdasarkan pengalaman empiris, bahasa lokal, serta praktik keseharian. Dalam kerangka ini, pengetahuan ekologis masyarakat Bajo tentang ombak, arus, dan

angin tidak sekadar bersifat teknis, tetapi merupakan sistem pengetahuan lokal yang terintegrasi dengan nilai budaya, sistem kepercayaan, dan strategi adaptasi hidup di laut.

Masyarakat Bajo mengembangkan klasifikasi lokal terhadap ombak berdasarkan tinggi gelombang, arah datangnya, bunyi, serta dampaknya terhadap perahu dan aktivitas melaut. Ombak tidak dipahami sebagai fenomena fisik yang homogen, melainkan sebagai entitas yang memiliki karakter dan perilaku tertentu. Melalui pengalaman turun-temurun, nelayan Bajo mampu membedakan ombak yang aman untuk melaut, ombak peringatan, hingga ombak berbahaya. Klasifikasi ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang berbasis pengamatan indrawi, seperti perubahan warna laut, ritme gelombang, dan suara hantaman air.

Dalam hal arus laut, masyarakat Bajo memiliki pengetahuan detail tentang arah, kecepatan, dan siklus pergerakan arus. Arus diklasifikasikan berdasarkan waktu kemunculannya, keterkaitannya dengan pasang surut, serta pengaruhnya terhadap pergerakan ikan dan perahu. Pengetahuan ini memungkinkan mereka menentukan jalur pelayaran yang efisien, memilih lokasi penangkapan ikan, serta menghindari wilayah berbahaya. Dalam perspektif etnoekologi, klasifikasi arus ini merupakan hasil interaksi jangka panjang antara manusia dan lingkungannya, yang disusun melalui pengalaman kolektif dan diwariskan secara lisan. Sementara itu, angin dipahami sebagai unsur penting yang mengatur ritme kehidupan masyarakat Bajo. Angin diklasifikasikan berdasarkan arah, kekuatan, musim kemunculan, serta tanda-tanda alam yang menyertainya, seperti perubahan awan, suhu udara, dan perilaku hewan laut. Angin tertentu diasosiasikan dengan keselamatan dan kelimpahan hasil laut, sedangkan angin lain dipandang sebagai pertanda bahaya. Dalam sistem etnoekologi, angin tidak hanya berfungsi sebagai faktor alam, tetapi juga sebagai penanda waktu ekologis yang mengatur kapan melaut, berlayar jauh, atau menetap di permukiman.

Ketiga unsur—ombak, arus, dan angin—tidak diklasifikasikan secara terpisah, melainkan dipahami sebagai sistem ekologis yang saling terkait. Masyarakat Bajo membaca hubungan antara perubahan angin dengan pola ombak dan arus, sehingga membentuk pengetahuan holistik tentang dinamika laut. Pengetahuan ini bersifat kontekstual dan situasional, berbeda dengan klasifikasi ilmiah modern yang cenderung terpisah-pisah. Dalam etnoekologi, cara pandang holistik ini mencerminkan rasionalitas ekologis lokal yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan laut. Lebih jauh, sistem klasifikasi lokal tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dan budaya. Pengetahuan tentang ombak, arus, dan angin menjadi dasar legitimasi sosial bagi nelayan yang lebih tua atau berpengalaman, sekaligus menjadi media pendidikan informal bagi generasi muda. Dengan demikian, etnoekologi tidak hanya membedah cara masyarakat Bajo memahami alam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengetahuan ekologis membentuk struktur sosial, otoritas pengetahuan, dan keberlanjutan praktik maritim mereka.

Melalui pendekatan etnoekologi, sistem klasifikasi lokal masyarakat Bajo terhadap ombak, arus, dan angin dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan ekologis yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa relasi manusia–laut dalam masyarakat Bajo dibangun atas dasar pemahaman mendalam terhadap tanda-tanda alam, yang sekaligus menjadi fondasi budaya dan strategi bertahan hidup di lingkungan laut. Orang Bajo mengenali ombak melalui bentuk, arah datang, suara, serta perubahan

warna permukaan laut. Ombak yang rendah, beraturan, dan “halus” dianggap sebagai tanda laut yang aman untuk melaut, sedangkan ombak tinggi, tidak beraturan, dan disertai angin kencang dipahami sebagai peringatan agar nelayan tidak memaksakan diri ke laut. Seorang nelayan Bajo Narji (56 tahun) menjelaskan:

“Kalau ombak sudah tidak teratur dan bunyinya keras, itu tandanya laut tidak bersahabat. Orang tua selalu bilang, lebih baik tinggal di rumah daripada laut ambil nyawa. (Wawancara 2025)”

Selain sebagai indikator keselamatan, ombak juga digunakan untuk membaca perubahan musim dan arah angin. Pergantian musim timur dan barat dikenali dari arah dan kekuatan ombak yang datang ke pemukiman. Nelayan Bajo menggunakan pengetahuan ini untuk menentukan waktu melaut, jarak pelayaran, dan lokasi penangkapan ikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Samsudin (62 tahun) :

“Dari arah ombak kita sudah tahu musim mau berubah. Kalau ombak dari timur mulai kuat, biasanya ikan juga ikut pindah, jadi kita atur lagi cara melaut. (Wawancara, 2025)

Pemahaman terhadap ombak juga memiliki dimensi filosofis dan moral. Ombak dipandang sebagai ekspresi kehendak laut yang harus dihormati, bukan dilawan. Karena itu, nelayan Bajo diajarkan untuk bersikap sabar dan tidak memaksakan diri ketika kondisi laut tidak memungkinkan. Seorang tetua adat Si Bagia (64 tahun) menyampaikan:

“Laut itu seperti ibu, kalau dia sedang marah kita tidak boleh melawan. Ombak itu bahasa laut, kalau tidak dipahami bisa celaka.(Wawancara, 2025)”

Dengan demikian, sistem pengetahuan orang Bajo dalam memahami ombak berfungsi sebagai pedoman keselamatan, strategi adaptasi ekologis, sekaligus cerminan nilai budaya. Pengetahuan ini membuktikan bahwa masyarakat Bajo memiliki mekanisme lokal yang efektif dalam membaca dinamika laut dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kehidupan masyarakat Suku Bajo menunjukkan keterpaduan yang kuat antara nilai budaya, pengetahuan lokal, dan upaya pelestarian lingkungan laut. Pantangan melaut yang diberlakukan secara adat, seperti larangan melaut pada waktu atau kondisi tertentu, berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial sekaligus strategi ekologis untuk menjaga keselamatan nelayan dan memberi waktu pemulihan bagi sumber daya laut. Pantangan ini memperlihatkan bahwa norma adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan manusia dengan alam. Pemanfaatan hasil laut secara selektif merupakan wujud nyata dari etika ekologis masyarakat Bajo. Penangkapan ikan dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran, jenis, dan musim, serta menghindari penggunaan alat tangkap yang merusak. Praktik ini menegaskan adanya kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan laut menentukan kelangsungan hidup generasi masa kini dan mendatang.

Pola pemukiman Suku Bajo yang berbentuk rumah panggung di atas perairan pesisir mencerminkan adaptasi ekologis yang ramah lingkungan. Pola ini meminimalkan perubahan fisik pada daratan pesisir, menyesuaikan dengan dinamika pasang surut, serta mempertahankan kedekatan masyarakat dengan ruang hidup dan ruang produksi mereka, yaitu laut. Tata ruang tersebut juga memperkuat ikatan sosial dan memudahkan transmisi nilai budaya. Secara filosofis, pandangan orang Bajo yang memaknai laut sebagai “ibu” menjadi landasan moral dalam seluruh praktik kehidupan mereka. Filosofi ini menempatkan laut sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati dan dijaga, bukan dieksplorasi secara berlebihan. Nilai ini terinternalisasi dalam sikap hidup sederhana, kehati-hatian dalam melaut, dan kepatuhan terhadap aturan adat. Selain itu, pengetahuan lokal masyarakat Bajo tentang musim, arah angin, arus laut, dan tanda-tanda alam berperan penting dalam menentukan waktu melaut, jenis tangkapan, serta strategi bertahan hidup. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dan praktik langsung, menjadi bagian dari sistem adaptasi ekologis yang terbukti efektif menghadapi ketidakpastian alam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal Suku Bajo merupakan sistem pengetahuan dan praktik ekologis yang holistik. Integrasi antara pantangan adat, pemanfaatan sumber daya secara selektif, pola pemukiman adaptif, nilai filosofis, dan pengetahuan musim menjadikan masyarakat Bajo sebagai contoh penting dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan berbasis budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aris Prihandono. (2012). *Kajian Masalah Ekologis Dalam Penataan Permukiman di Kawasan Pesisir Study of Ecological Issues in Settlement Structuring on the Water Coastal Zone*.
- [2] Adhuri, D. S. (2013). Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia. Canberra: ANU Press.
- [3] Bailey, C., & Zerner, C. (1992). Community-based fisheries management institutions in Indonesia. *Marine Policy*, 16(3), 237–250.
- [4] Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. New York: Routledge.
- [5] Fadhliyah H Dai & Ramoend Manahung. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo Studi Etnografi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pada Praktek Ritual Keagamaan di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta. *IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo Studi Etnografi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pada Praktek Ritual Keagamaan di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta), 41–57.
- [6] Gusman, A. R., & Widodo, J. (2019). Kearifan lokal masyarakat Bajo dalam pengelolaan sumber daya laut. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(2), 123–138.
- [7] Haerulloh, A. A., Nurrohmah, S. L., Alim, M., & Ampera, T. (2021). *IDENTITAS BUDAYA DAN SEJARAH SUKU BAJO DI BAJO PULAU PASCANOMADEN* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>
- [8] Jayanti, S., Yusuf, S., Sjamsu, D., & Lawelle, A. (2018). Local Wisdom Study Of Otipulu Village Community Towards Fishing Activity (A Study Case

- In Otipulu Village, Lasolo Districk, North Konawe Regency). In *J. Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO* (Issue 4). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSEP>
- [9] Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. Yogyakarta: LKiS.
- [10] Koentjaraningrat. 1992. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Rahim, A., Bahtiar, & Nurlila, R. U. (2018). Pola permukiman masyarakat Suku Bajo di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. *Jurnal Penelitian Sosial dan Budaya*, Universitas Halu Oleo.
- [12] Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [13] Sugiono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D
- [14] Suyuti, N. (2011). *Orang Bajo di Tengah Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- [15] Sopher, D. E. (1977). *The Sea Nomads: A Study of the Maritime Boat People of Southeast Asia*. Singapore: National Museum of Singapore.
- [16] Stacey, N. (2007). *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Canberra: ANU E Press.
- [17] Wa Ode Siti Nurhaliza. (n.d.). *DESCHOOLING SUKU BAJO SAMPELA DALAM BUDAYA LAUT (Studi Etnografi Komunikasi Tentang Deschooling Sebagai Upaya Transfer)*.
- [18] Wantu, S. M., Kamuli, S., Wantu, A., & Paulus, I. (2022). Identitas dan Karakter Suku Bajo di Torosiaje di Tengah Arus Globalisasi. *Jambura Journal Civic Education*, 2(1), 82–89. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i1.14503>